

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Berikan Keterangan Terkait UU Otonomi Khusus Papua

Jakarta, 16 Oktober 2019 □ Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil frasa Partai Politik pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 21/2001) pada Rabu (16/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001: *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Padahal menurut Pemohon, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, Pemohon menilai bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan frase konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai □Partai Lokal□ □Partai Pol

Dalam sidang Senin (7/10), mewakili Pemerintah, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad memaparkan bahwa UU Otsus Papua ini merupakan bagian dukungan Pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti parpol, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi. Selain itu, rekrutmen parpol di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya, parpol nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai anggotanya dan meminta pertimbangan MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus Provinsi Papua. Sedangkan masyarakat Papua, tanpa membentuk papol lokal pun tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui parpol nasional. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id